



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



Ir. Adi Junjunan Mustafa, M.Sc.
Plt. Sekretaris Deputi SDM Aparatur
Jogjakarta, 24 April 2019
Rakor Administrasi Kepegawaian 2019
Kemenkes RI

Kebijakan Manajemen ASN Menuju Smart ASN 2024

Materi Pembahasan

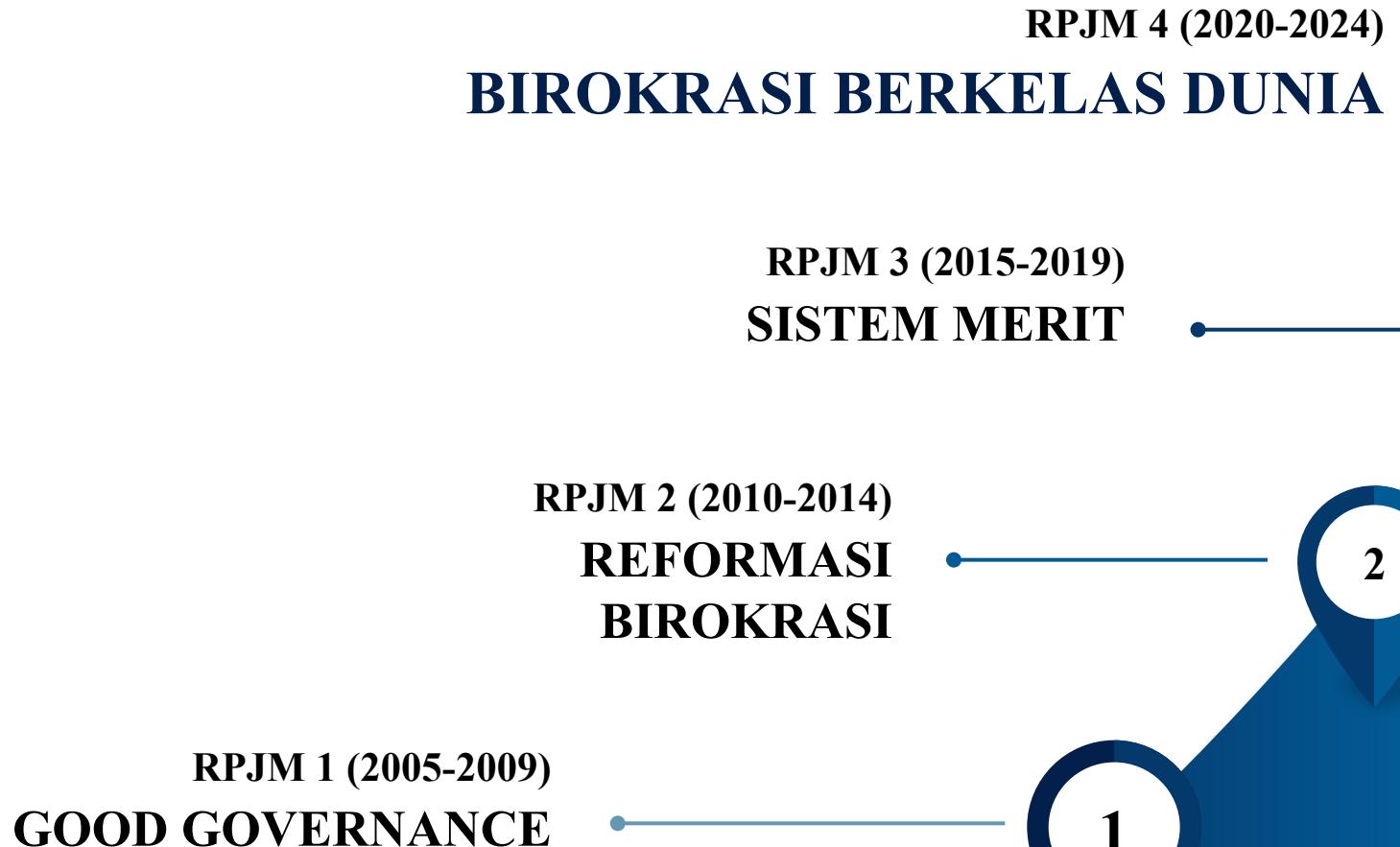


1. Grand Design Pembangunan ASN 2024
2. Manajemen ASN berbasis Sistem Merit
3. Eksplorasi Karakteristik Smart ASN
4. Beberapa Program Unggulan Deputi SDM Aparatur

1. *Grand Design* Pembangunan ASN 2024

PETA JALAN PEMBANGUNAN

Aparatur Sipil Negara



Smart ASN 2024: Tantangan Pembangunan ASN

KONDISI
SAAT INI
4,35 Juta ASN

Internal:

- Mismatch
- Indisipliner

PROGRAM STRATEGIS

- Perencanaan
- Rekrutmen & Seleksi
- Pengembangan Kompetensi
- Reformasi Kesejahteraan

Eksternal:

- Globalisasi & persaingan
- Tuntutan publik

T
A
N
T
A
N
G
A
N

SMART ASN

Profil:

- **Integritas**
- **Nasionalisme**
- **Wawasan Global**
- **IT & Bahasa Asing**
- ***Hospitality***
- ***Networking***
- ***Entrepreneurship***

WORLD CLASS GOVERNMENT 2024

Lingstra yang mempengaruhi Pembangunan ASN

Orientasi: 10 kecenderungan besar dunia (*global megatrend*)



- Pertumbuhan penduduk dunia melambat, penduduk usia lanjut meningkat, migrasi antar negara tinggi
- 65% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan, kota sebagai ruang eksternalitas dan pelayanan dasar masyarakat
- Negara berkembang penggerak perdagangan dunia
- Potensi krisis keuangan global
- *Middle and upper income class* meningkat pesat
- Multipolar dengan perebutan pengaruh negara-negara besar di Asia
- Kekhawatiran terhadap persediaan pangan, air, energi
- Revolusi industri 1.0 ke 4.0 dan breakthrough teknologi ke depan
- Resiko kenaikan suhu global (iklim global)

Lingstra yang Mempengaruhi Pembangunan ASN

7 trend perubahan yang akan mentransformasi cara kerja birokrasi di masa depan

Government as an enabler instead of a solution provider

- Peran dan kontribusi aktor non-pemerintah akan semakin besar dalam memecahkan suatu persoalan

Made-for-me service delivery

- Pelayanan publik oleh pemerintah akan semakin *personalized* yang mudah diakses dari mana saja dan kapan saja

Distributed governance

- Proses *co-creation* antara pemerintah dan masyarakat akan semakin banyak dilakukan dalam melahirkan berbagai inovasi

Data-smart government

- *Evidence-based policy* dengan memanfaatkan *Big Data* untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat

Alternative forms of government funding

- *Public-private partnership*
- *Digital payment*

Just-in-time civil service

- Manajemen pegawai yang dinamis dan fleksibel
- *Talent pool, open source talent*

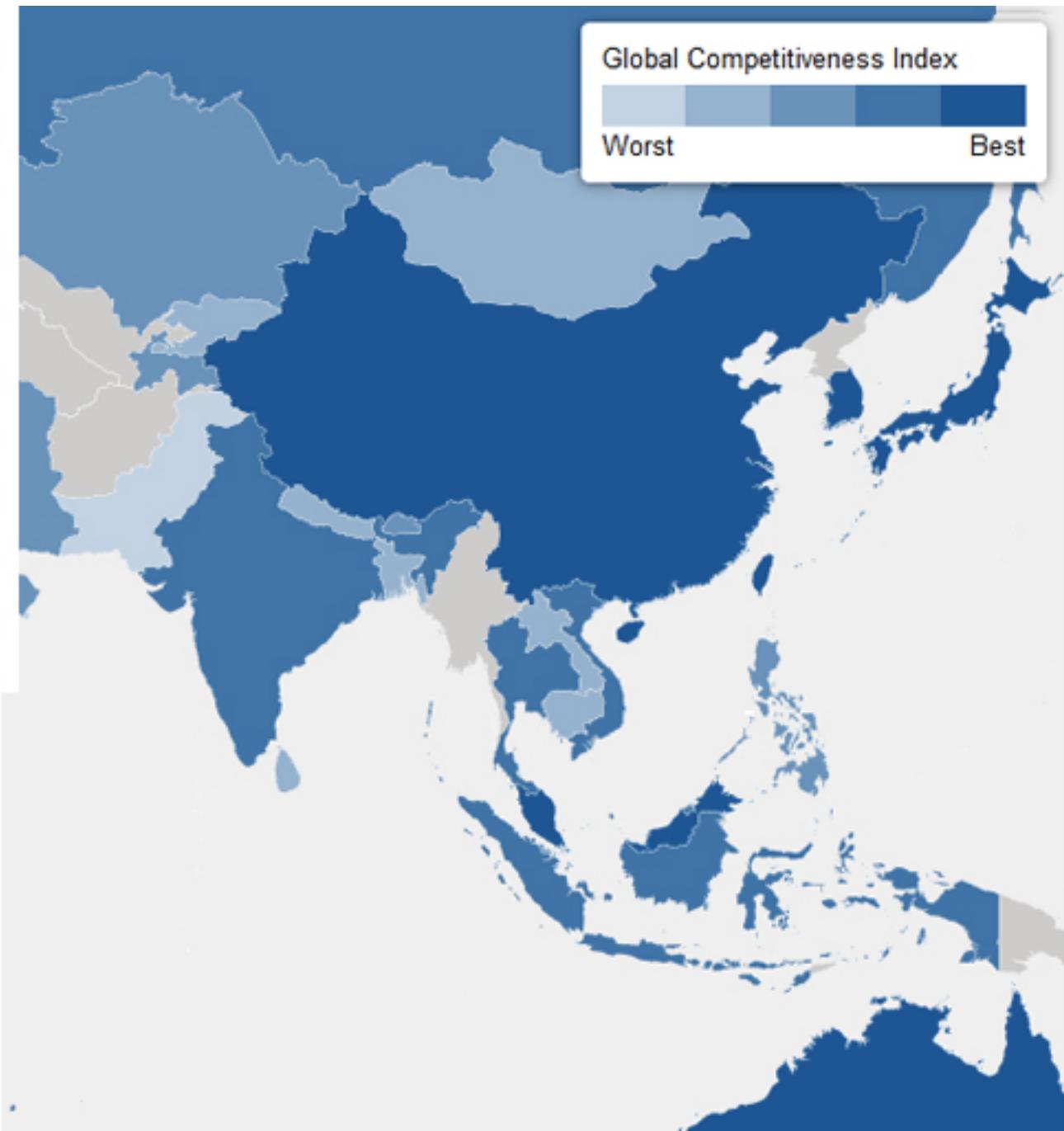
A new basis for national prosperity

- Indikator non-ekonomi sebagai ukuran kesejahteraan (lingkungan, kesehatan, kebebasan, keamanan, dsb)

Sumber: Deloitte, Gov2020: A Journey into the Future of Government, 2015

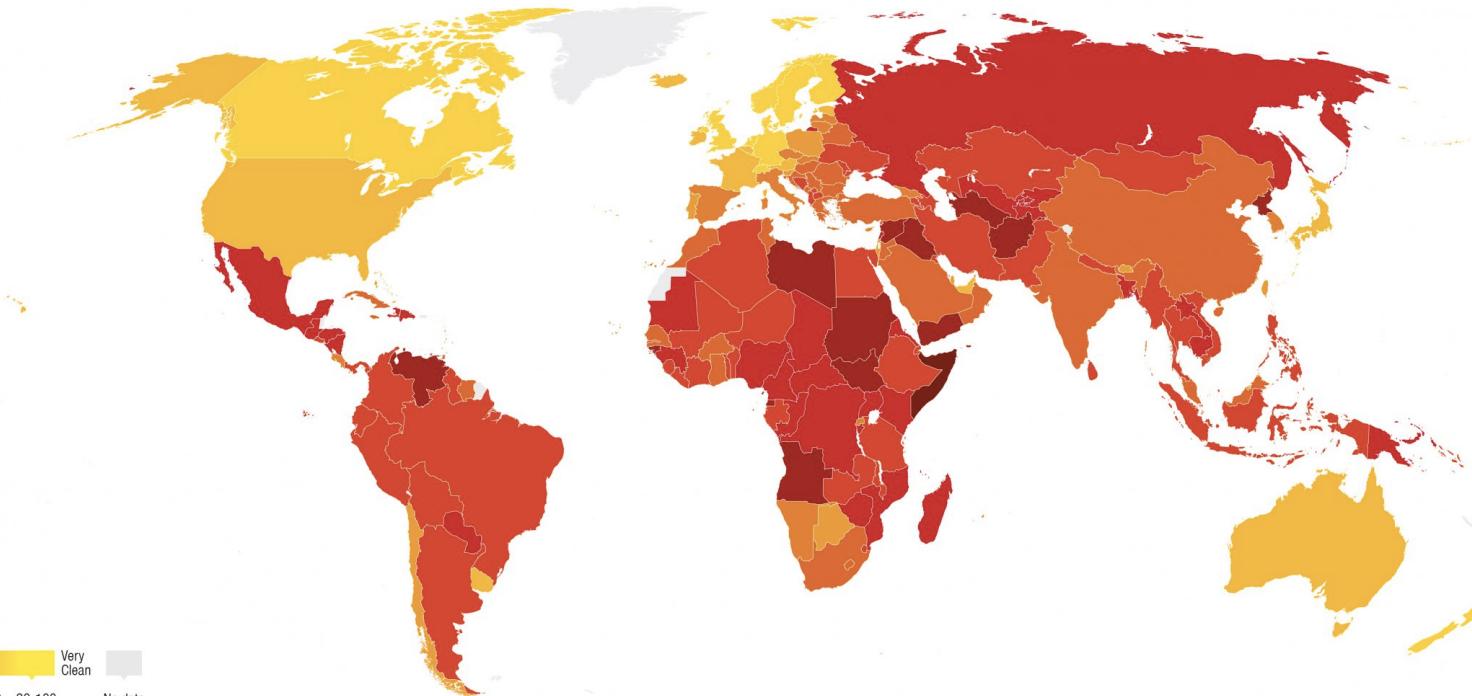
	2018	2017	Change
Singapore	3	2	↓ -1
Malaysia	23	25	↑ 2
Thailand	32	34	↑ 2
Indonesia	36	41	↑ 5
Brunei	46	58	↑ 12
Vietnam	55	75	↑ 20
Philippines	56	57	↑ 1
Cambodia	94	89	↓ -5
Laos	98	93	↓ -2
Myanmar	n/a	n/a	

*“the set of institutions,
policies and factors that
determine the level of
productivity of a country”*



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017

The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.



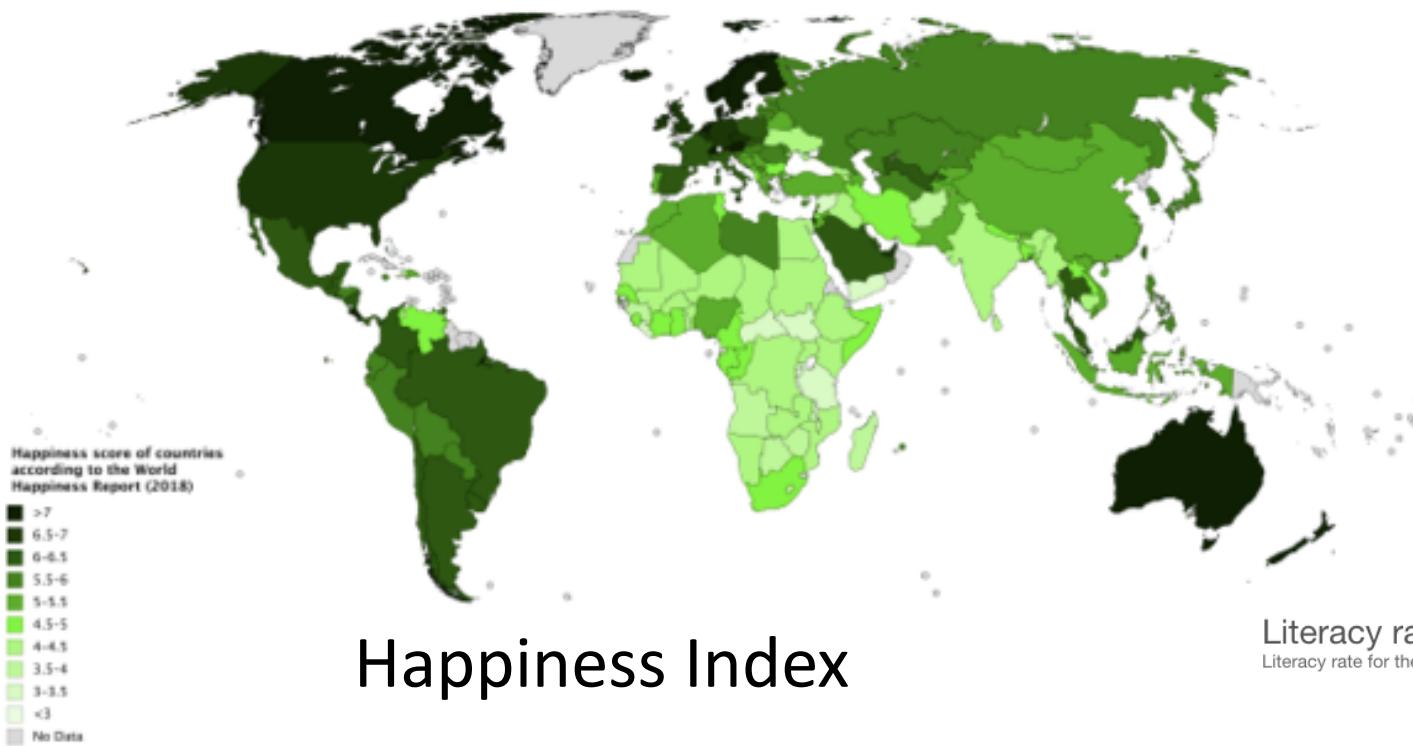
SCORE



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	New Zealand	89	21	Estonia	71	40	Saint Vincent and the Grenadines	58	59	Romania	48	96	Thailand	37	122	Azerbaijan	31	135	Russia	29
2	Denmark	88	21	United Arab Emirates	71	42	Cyprus	57	62	Cuba	47	81	Ghana	40	96	Zambia	37	143	Bangladesh	28
3	Finland	85	23	France	70	42	Czech Republic	57	64	Malaysia	47	81	India	40	103	Bahrain	36	143	Guatemala	28
3	Norway	85	23	Uruguay	70	42	Dominica	57	64	Montenegro	46	81	Morocco	40	103	Côte D'Ivoire	36	143	Kenya	28
3	Switzerland	85	25	Barbados	68	42	Spain	57	66	Sao Tome and Principe	46	81	Turkey	40	103	Mongolia	36	143	Tajikistan	21
6	Singapore	84	26	Bhutan	67	42	Hungary	45	66	Argentina	39	85	Benin	39	107	Armenia	35	143	Lebanon	28
6	Sweden	84	26	Chile	67	46	Georgia	56	66	Senegal	45	85	Kosovo	39	107	Ethiopia	35	143	Mauritania	28
8	Canada	82	28	Bahamas	65	46	Malta	56	68	Belarus	44	85	Kuwait	39	107	Macedonia	35	148	Comoros	27
8	Luxembourg	82	29	Portugal	63	48	Cabo Verde	55	68	Jamaica	44	85	Solomon Islands	39	107	Vietnam	35	148	Guinea	27
8	Netherlands	82	29	Qatar	63	48	Rwanda	55	68	Oman	44	85	Swaziland	39	111	Philippines	34	148	Nigeria	27
8	United Kingdom	82	29	Taiwan	63	48	Saint Lucia	55	71	Bulgaria	43	91	Albania	38	112	Algeria	33	149	Iraq	18
12	Germany	81	32	Brunei Darussalam	62	51	Korea (South)	54	71	South Africa	43	91	Bosnia and Herzegovina	38	112	Bolivia	33	151	Nicaragua	26
13	Australia	77	32	Israel	62	52	Grenada	52	71	Vanuatu	43	91	Guyana	38	112	El Salvador	33	169	Venezuela	18
13	Hong Kong	77	34	Botswana	61	53	Namibia	51	74	Burkina Faso	42	91	Sri Lanka	38	112	Maldives	33	171	Korea (North)	17
13	Iceland	77	34	Slovenia	61	54	Italy	50	74	Lesotho	42	91	Timor-Leste	38	112	Niger	33	171	Equatorial Guinea	17
16	Austria	75	36	Poland	60	54	Mauritius	50	74	Tunisia	42	91	Ecuador	32	117	Honduras	29	171	Guinea Bissau	17
16	Belgium	75	36	Seychelles	60	54	Slovakia	50	77	China	41	96	Colombia	37	117	Kyrgyzstan	29	171	Libya	17
16	United States	75	38	Costa Rica	59	57	Croatia	49	77	Serbia	41	96	Indonesia	37	117	Egypt	32	171	Sudan	16
19	Ireland	74	38	Lithuania	59	59	Saudi Arabia	49	77	Suriname	41	96	Panama	37	117	Gabon	32	175	Yemen	16
20	Japan	73	40	Latvia	58	59	Greece	48	77	Trinidad and Tobago	41	96	Peru	37	117	Pakistan	32	175	Afghanistan	15
						59	Jordan	48	96			96	Peru	37	117	Togo	32	177	Uzbekistan	22
									96			135	Paraguay	29	178	Syria	14			
												135	Papua New Guinea	29	179	Zimbabwe	22			
												135	Mexico	29	179	South Sudan	12			
												135	Laos	29	180	Cambodia	21			
												135	Cameroon	25		Somalia	9			

#cpi2017

www.transparency.org/cpi



Empat Pilar Kebahagiaan

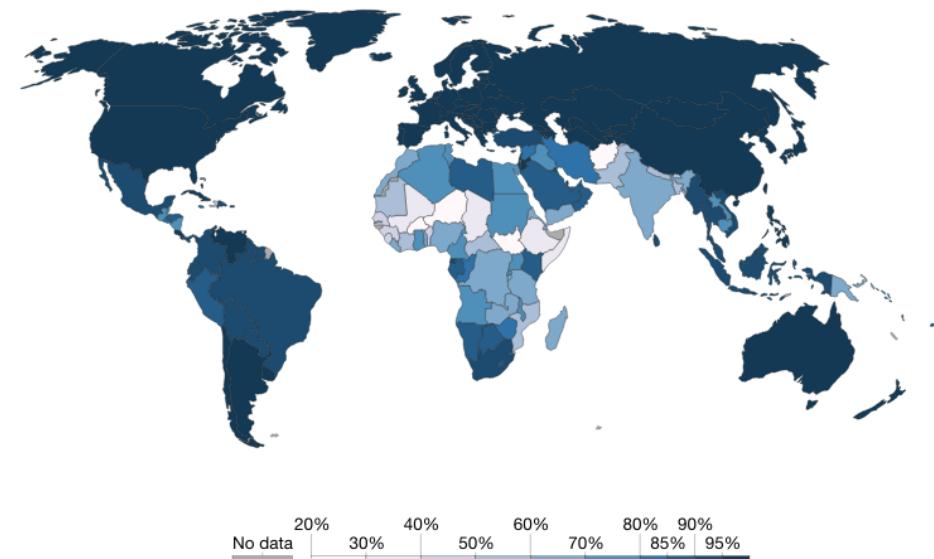
1. tata kelola pemerintahan yang baik.
2. pembangunan sosial-ekonomi yang berkesinambungan.
3. ketahanan dan perlindungan budaya.
4. ketahanan dan pemeliharaan lingkungan.

Sembilan Sasaran Kebahagiaan

- kesehatan psikologis.
- kesehatan fisik.
- pendidikan.
- pemanfaatan waktu.
- ketahanan dan keanekaragaman budaya.
- tata kelola pemerintahan.
- ikatan komunitas.
- ketahanan ekologi.
- standar hidup.

Literacy rate by country, 2011
Literacy rate for the entire population, 2011 or latest data from CIA Factbook.

OurWorld
in Data



TANTANGAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN



Akuntabilitas dan Kinerja masih perlu ditingkatkan



Efektifitas dan Efisiensi masih perlu ditingkatkan



Pelayanan Publik Belum Optimal

EoDB: Ease of Doing Business

GCI: Global Competitiveness Index

IEP: Indeks Efektivitas Pemerintah

	2016/2017	2017/2018	PERUBAHAN
EoDB	61,5/91	66,47/72	Naik 19 tingkat
GCI	4,52/41	4,65/36	Naik 5 tingkat
IEP	46/121	53/98	Naik 23 tingkat

Government Effectiveness menunjukkan persepsi tentang:

- 1. Mutu layanan publik,*
- 2. Mutu SDM aparatur sipil negara,*
- 3. Derajat kemandirian ASN dari intervensi politik,*
- 4. Kapasitas perumusan dan implementasi kebijakan negara, dan*
- 5. Kredibilitas dari komitmen Pemerintah pada kebijakan negara.*

POTRET ASN SAATINI

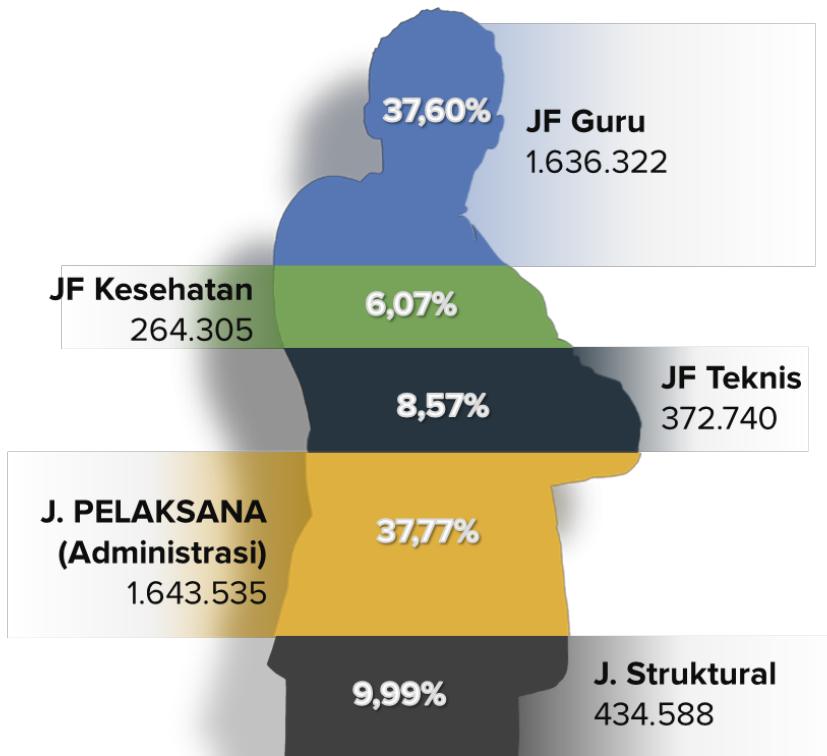


4,374,341
Jumlah Total ASN

- Pusat
- Daerah

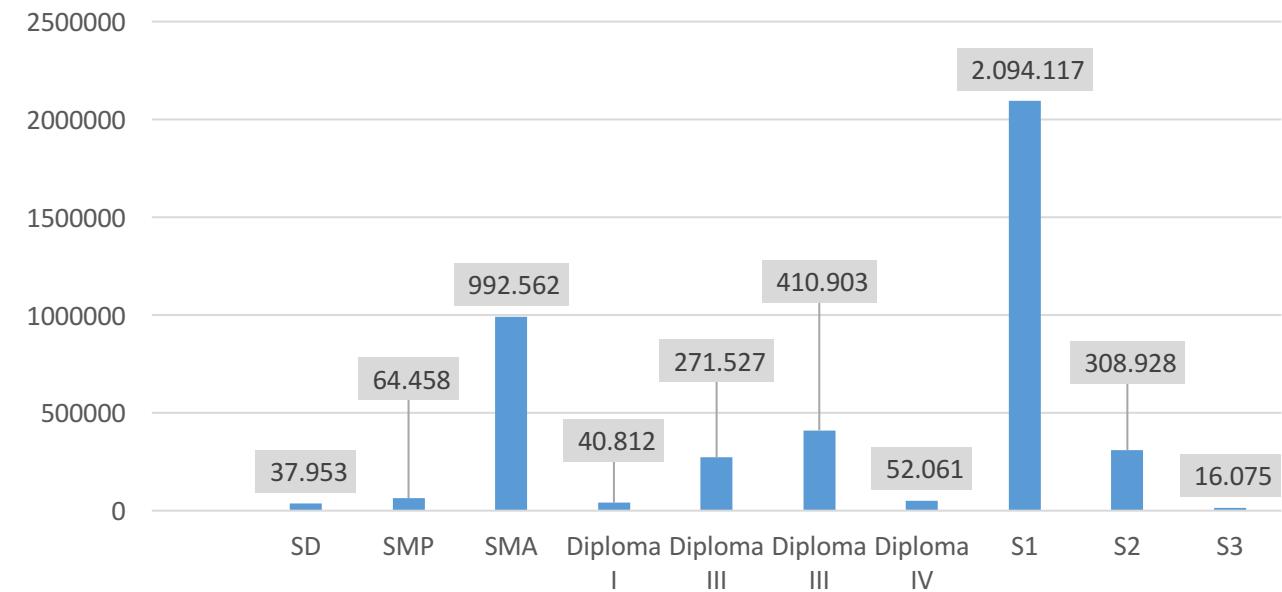
: 918,436 (21%)
: 3,455,905 (79%)

Komposisi ASN Indonesia



ASN Berdasarkan Pendidikan

Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan, 2017



Pemenuhan SDM sesuai Kebutuhan Nasional & Daerah



MISMATCH SDM ASN DENGAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL

Minyak dan Gas,
Batubara, Kelapa
Sawit, Besi Baja,
Bauksit, Perkayuan

WILAYAH KALIMANTAN

JABATAN	PERSENTASE JABATAN
Bidang Perkebunan/Pertanian/ Penyuluh	2,46%
Bidang Industri (poros maritim/Infrastruktur)	0.09%
Bidang Pertambangan/geologi	0.06%

Kelapa Sawit,
Karet, Batu Bara,
Perkapalan, Besi
Baja, Kawasan
Strategis Nasional
(KSN) Selat Sunda

WILAYAH SUMATERA

JABATAN	PERSENTASE JABATAN
Bidang Perkebunan/Pertanian dan Penyuluh	2.2%
Bidang Industri	0.07%
Bidang Pertambangan/geologi	0.05%

Prosentase Jabatan Teknis terhadap Jabatan ASN per Pulau di Indonesia



WILAYAH JAWA

JABATAN	PERSENTASE JABATAN
Bidang transportasi	0.12%
Bidang Industri	0.25%

Makanan-minuman,
tekstil, peralatan
transportasi,
perkapalan, telematika,
alutista, Jabodetabek
area

WILAYAH SULAWESI

JABATAN	PERSENTASE JABATAN
Bidang Pertanian/penanaman	2.6%
Bidang Perikanan	0.1%
Bidang Pertambangan/geologi	0.01%

Pertanian Pangan (Padi,
Jagung, Kedelai dan Ubi
Kayu), Kakao, Perikanan,
Nikel, Minyak dan Gas,
Bumi (Migas)

WILAYAH MALUKU PAPUA

JABATAN	KEBUTUHAN
Bidang Perikanan	0.25%
Bidang Pertanian/penanaman	1.63%
Bidang Pertambangan	0.03%

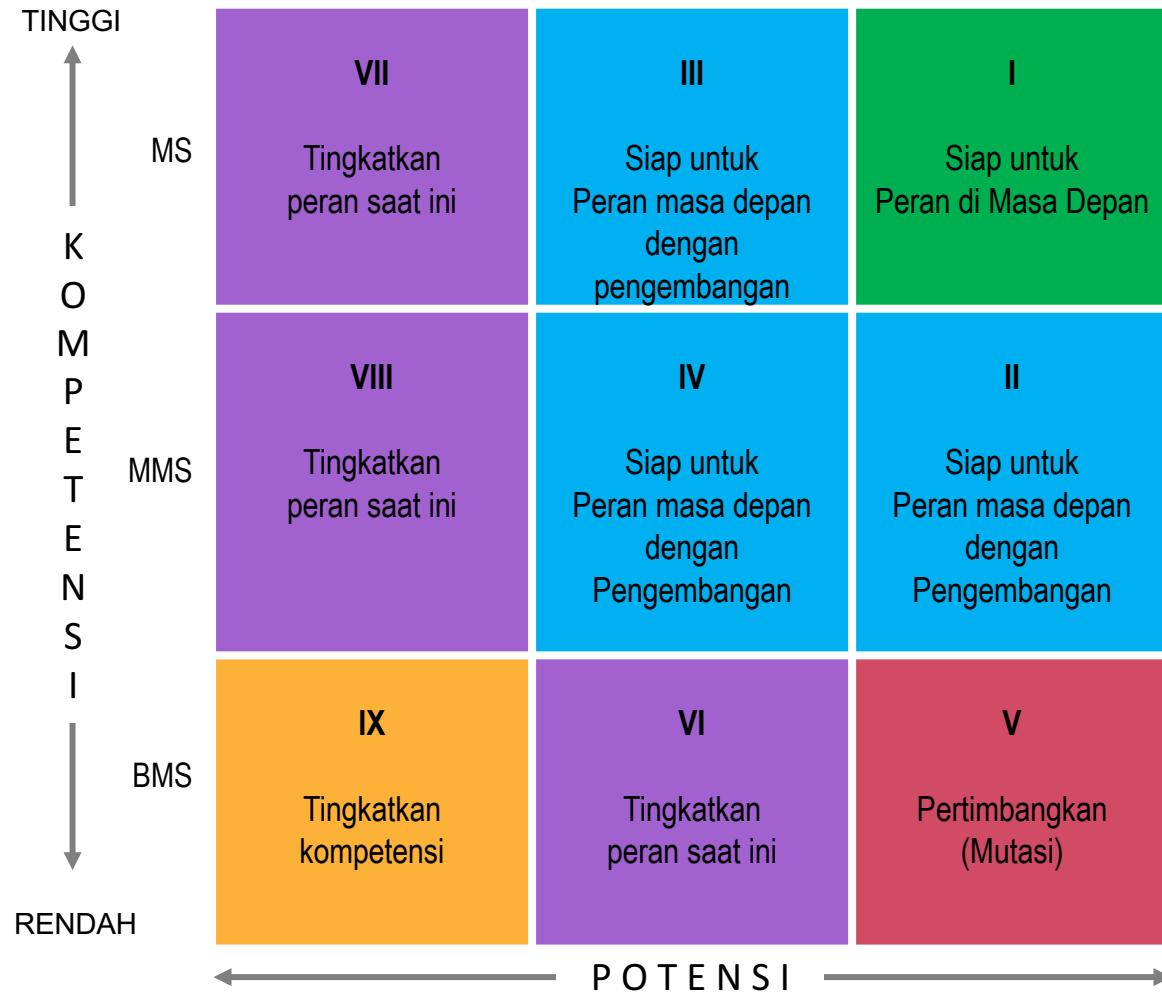
Pertanian
Pangan –
MIFEE,
Tembaga,
Nikel, Minyak
dan Gas Bumi,
Perikanan

WILAYAH BALI NUSA TENGGARA

JABATAN	PERSENTASE JABATAN
Pariwisata	0.5%
Bidang Perikanan	0.4%
Bidang Peternakan	2.23%

Pariwisata, Perikanan, Peternakan

Matriks Hasil Asesment untuk Mencapai Kinerja Tinggi



Target Peningkatan Kompetensi

Area	Base-line	Target 2024
I	11.52%	?
II	1.95%	
III	12.21%	
IV	2.34%	↗
V	2.73%	
VI	7.91%	
VII	19.82%	
VIII	6.93%	
IX	34.57%	

BAGAIMANA MENINGKATKAN KOMPETENSI?



2. Manajemen ASN berbasis Sistem Merit

KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)



Standar Kompetensi Manajerial

TRACKING BEST LEADERS AND BEST EMPLOYEES
(internalisasi terhadap 500 ribuan pejabat struktural)



Pengacuan Standar Kompetensi ASN

1. perencanaan;
2. pengadaan;
3. pengembangan karier;
4. pengembangan kompetensi;
5. penempatan;
6. promosi dan/atau mutasi;
7. uji kompetensi;
8. sistem informasi manajemen; dan
9. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) ASN.

MANAJEMEN KARIER PNS

Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier, Promosi dan Mutasi dengan Sistem Merit

TUJUAN

1. Memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
2. Menyeimbangkan antara pengembangan karir PNS dan kebutuhan instansi;
3. Meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS;
4. Mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

SASARAN

1. Tersedianya pola karier nasional dan panduan penyusunan pola karier instansi;
2. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah

MANAJEMEN KARIER PNS

Sistem Merit

Manajemen ASN yang diterapkan dengan adil dan wajar terhadap pelaksanaan : **kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, integritas dan moralitas**, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

SISTEM INFORMASI ASN →

Tingkat Instansi & Nasional

A. Pengangkatan s.d. pemberhentian.

B. Disesuaikan dengan kebutuhan instansi

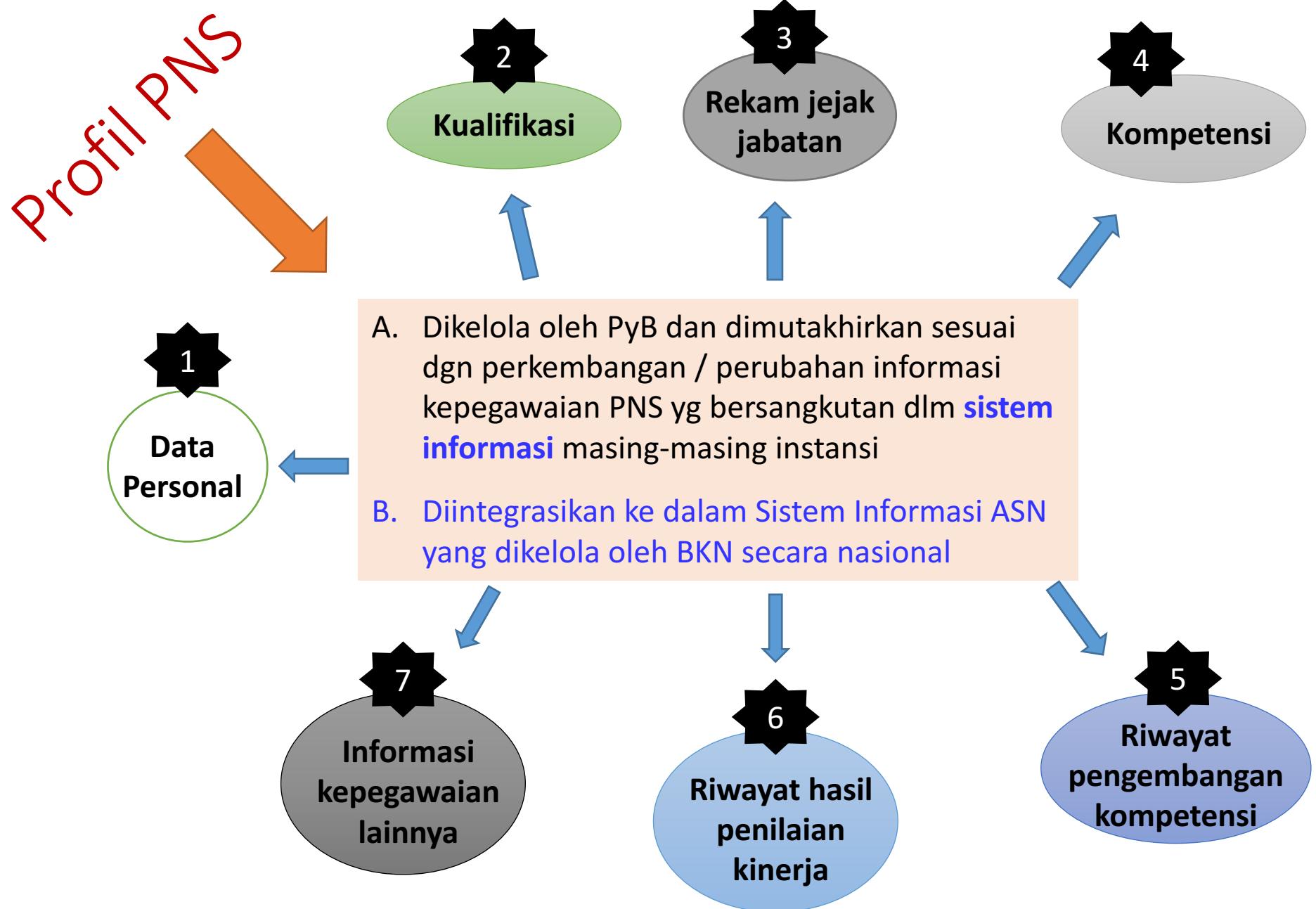
C. Standar Kompetensi Jabatan (diatur Permen) →

D. Profil PNS

- 1. nama jabatan;
- 2. uraian jabatan;
- 3. kode jabatan;
- 4. pangkat yang sesuai;
- 5. kompetensi teknis;
- 6. kompetensi manajerial;
- 7. kompetensi sosial kultural; dan
- 8. ukuran kinerja jabatan



- 1. data personal; 2. kualifikasi; 3. rekam jejak jabatan;
- 4. kompetensi; 5. riwayat pengembangan kompetensi;
- 6. riwayat hasil penilaian kinerja; 7. informasi kepegawaian lainnya.



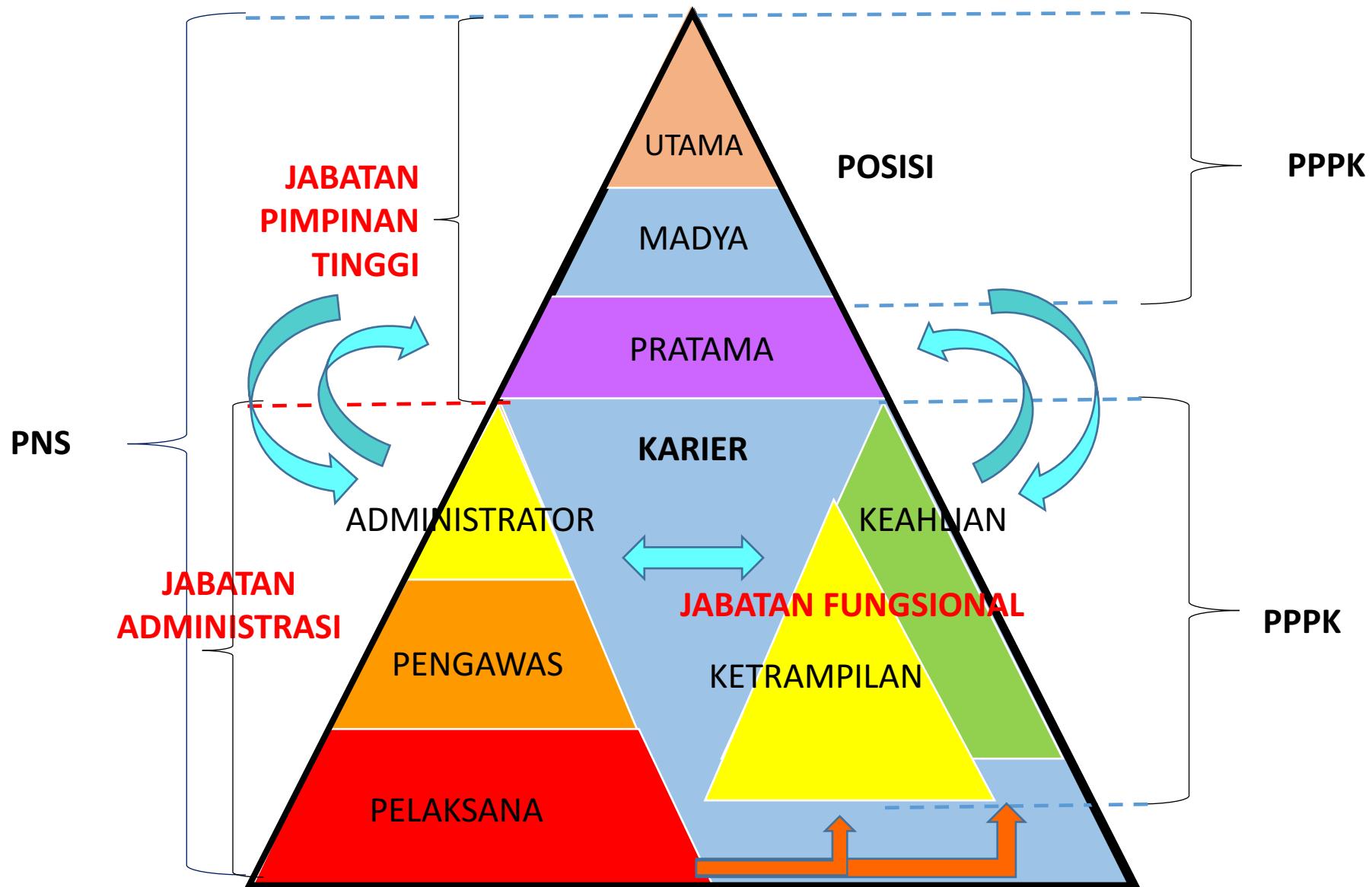
PEMETAAN KINERJA & KUALIFIKASI-KOMPETENSI PEGAWAI ASN

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Wajib Melakukan
Pemetaan Kualifikasi & Kompetensi – Kinerja ASN

Simplified Talent Mapping: Finding Best Talent (Kuadran 1)



POLA KARIR PEGAWAI ASN



PENGEMBANGAN KARIER



1. berdasarkan **kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi**;
2. mempertimbangkan **integritas dan moralitas**;
3. diselenggarakan di tingkat instansi; dan nasional. melalui: **mutasi, promosi, dan/atau penugasan khusus**

TINGKAT INSTANSI :

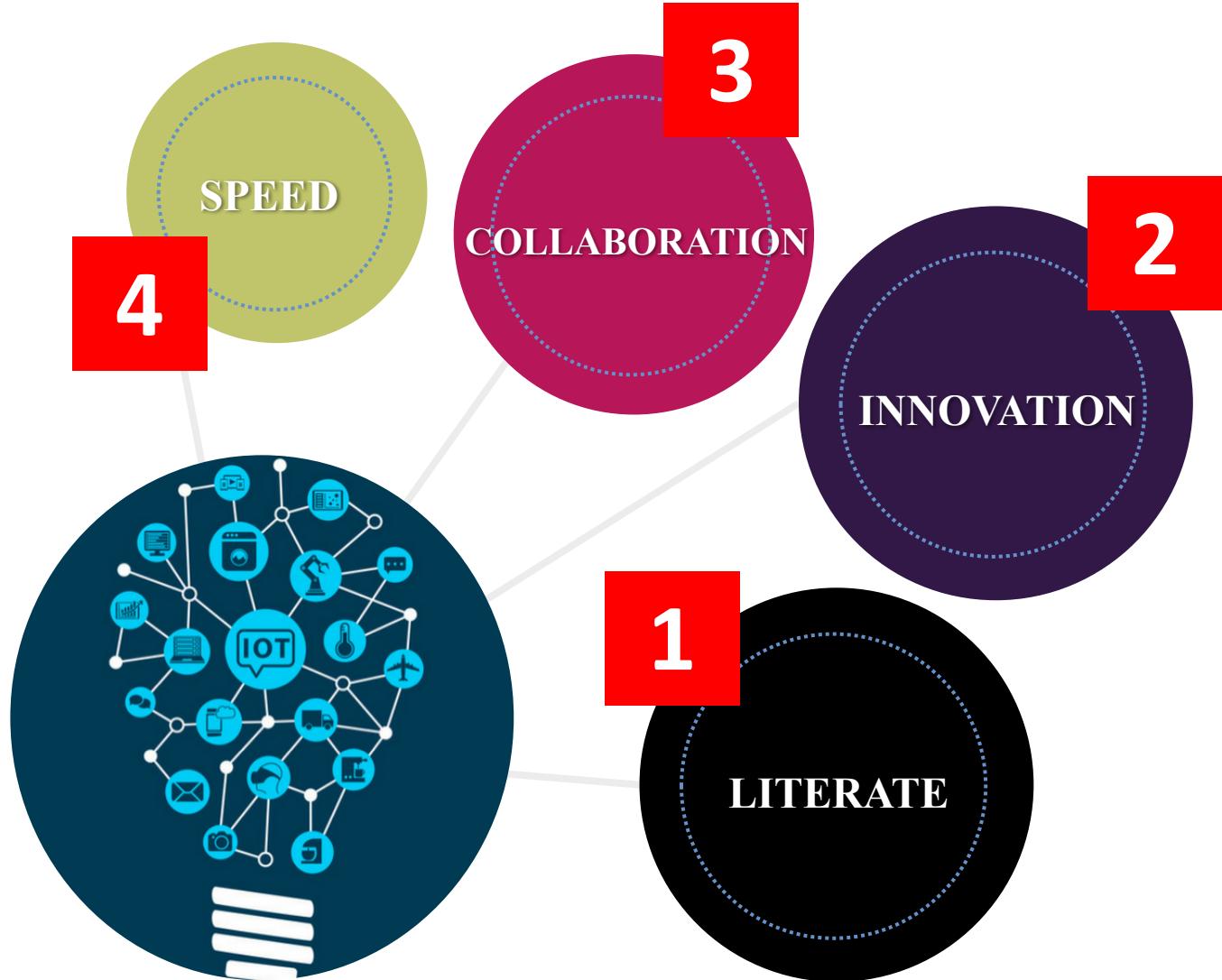
1. Ditetapkan oleh PPK (penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier pegawai).
2. PPK wajib: menetapkan rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi pengembangan karier.
3. PPK menominasikan PNS yang masuk dalam ***talent pool*** (**kelompok rencana sukses**) di lingkungannya untuk mengisi lowongan sesuai kebutuhan instansi.

TINGKAT NASIONAL,

BKN wajib mengumumkan informasi lowongan jabatan di seluruh instansi pusat dan instansi daerah melalui Sistem Informasi ASN.

3. Eksplorasi Karakteristik Smart ASN

DISRUPTION ERA

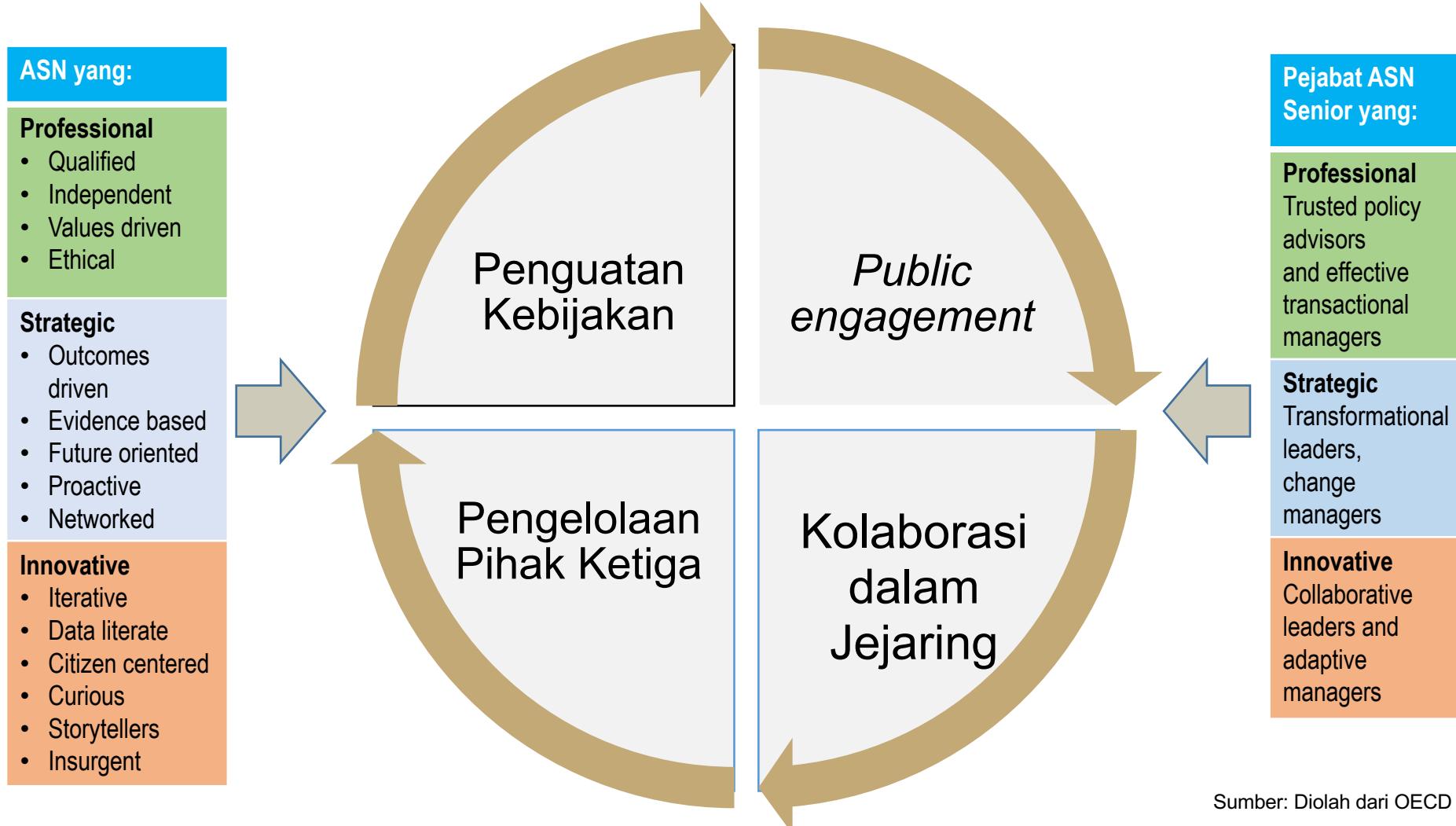


- Di era Industri 4.0, hampir 60% jenis pekerjaan di negara OECD akan tergantikan oleh otomatisasi*
- Kebutuhan terhadap pekerja *high-skilled* akan semakin tinggi
- Kebijakan industri dan pengembangan ekonomi yang ada saat ini akan ditantang dengan derasnya arus digitalisasi

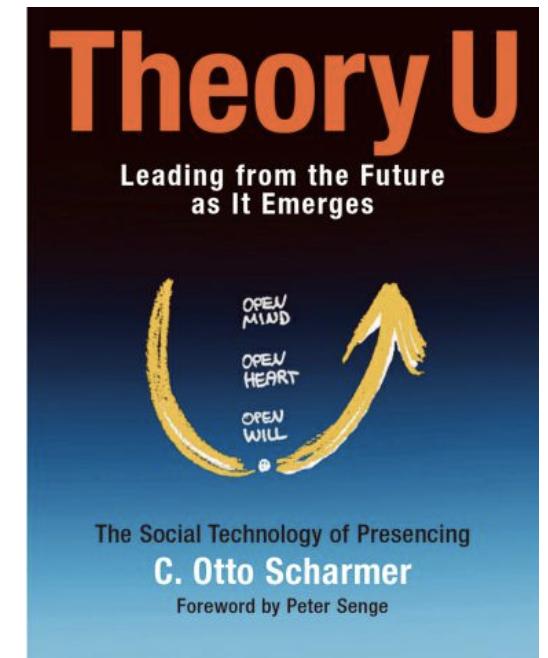
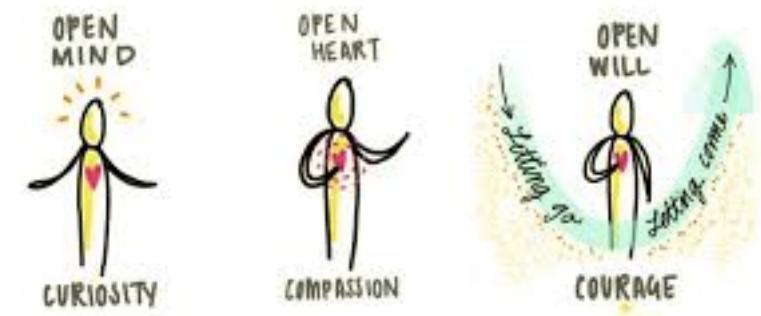
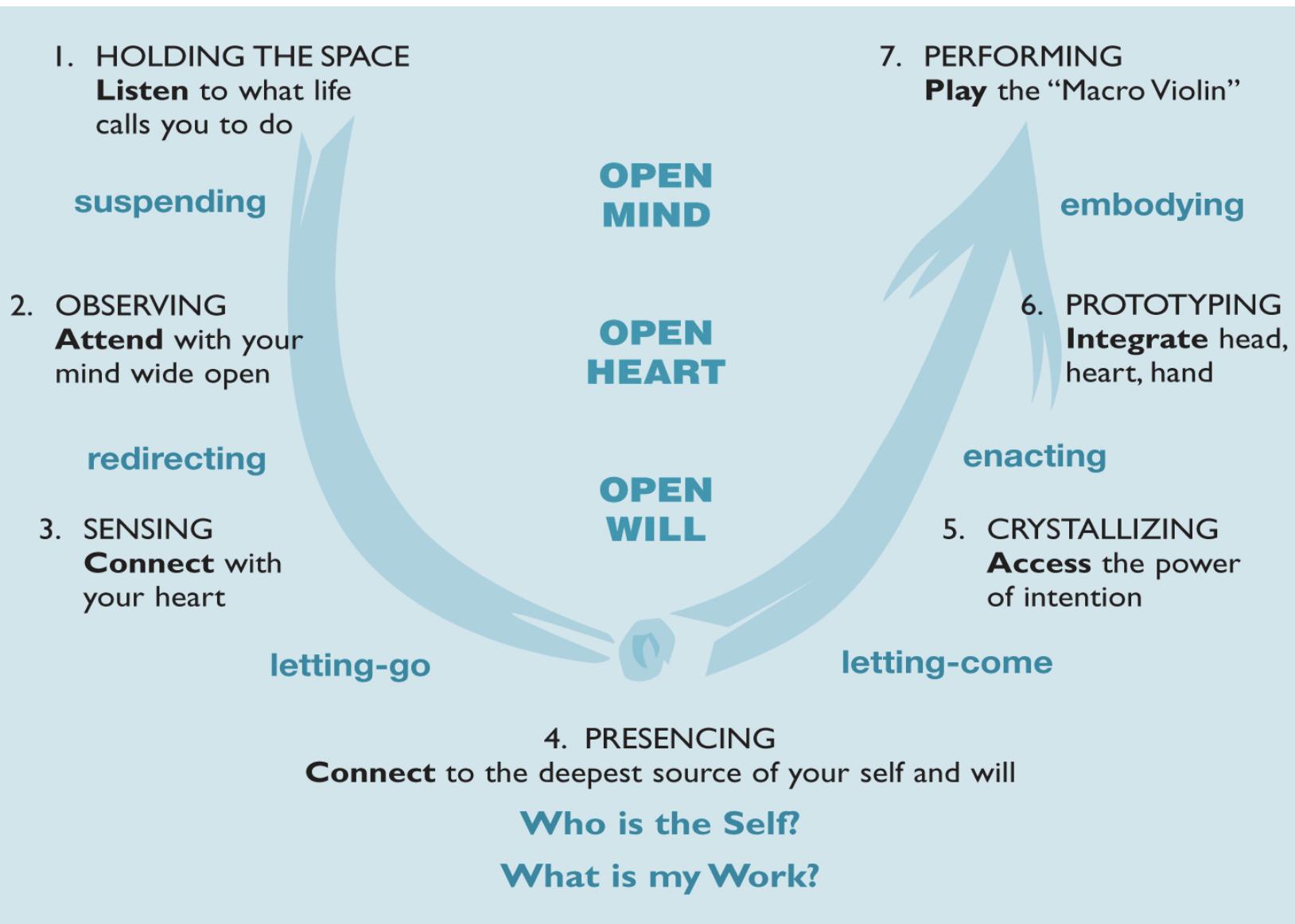
*The World Bank, [World Development Report 2016: Digital Dividends](#), May 2016.

PROFIL MASA DEPAN

ASN Berkinerja Tinggi (Professional, Strategic, Innovative)

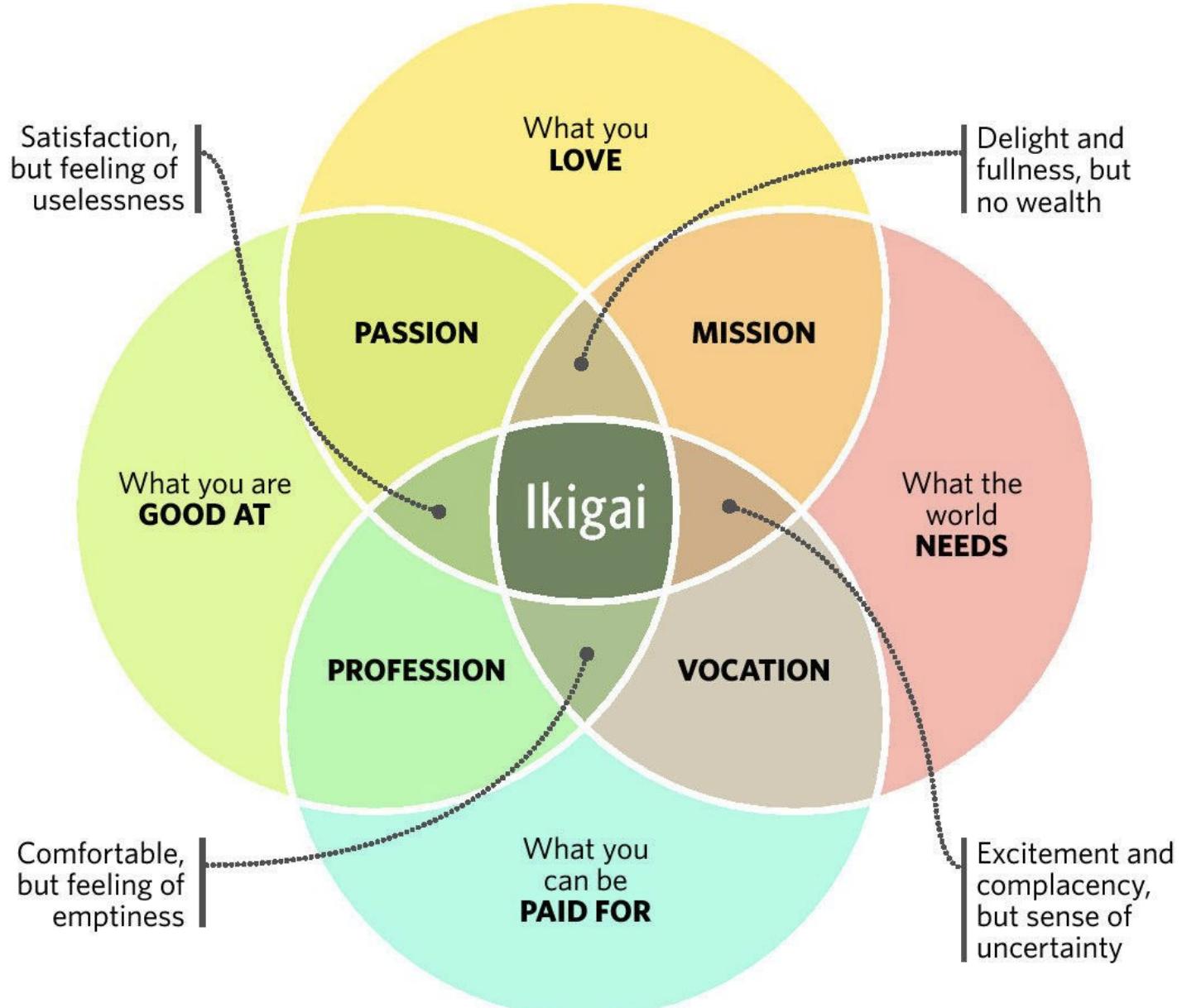


Sumber: Diolah dari OECD



Ikigai

A JAPANESE CONCEPT MEANING "A REASON FOR BEING"



4. Program Unggulan Deputi SDM Aparatur

Beberapa Program Unggulan



Manajemen Talenta Nasional

- Pemberdayaan high performers lebih optimal
- Mendukung tujuan strategis nasional



ASN Corporate University

- Transformasi sistem diklat
- Terintegrasi dengan rencana strategis organisasi



Inovasi Kesejahteraan ASN

- ASN City, ASN Mart
- Partnership with other institutions



Pengembangan Sistem Rekrutmen dan Karier

- Talent scouting, attracting the best talent
- Memperhatikan Gen-Y (milenial), Gen-Z (dan Gen-Alpha)

Pengukuran Kualitas Kebijakan ASN

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Sistem Merit

Indeks Kesejahteraan ASN



Terima Kasih
Adi Junjunan Mustafa
adi.junjunan@menpan.go.id
0812-8226-5726